

# UJI KOMPETENSI BERBASIS KERJA DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

**Budi Santosa**

Universitas Ahmad Dahlan  
budi.santosa@mpv.uad.ac.id

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan uji kompetensi berbasis kerja di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ketika siswa belajar di tempat kerja. Metode penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan oleh Gall. Responden adalah siswa, guru, pembimbing industri dan penilai badan sertifikasi profesional yang berasal dari empat sekolah dan empat lokakarya

Hasil penelitian dan pengembangan uji kompetensi berbasis kerja didasarkan pada integrasi proses pembelajaran di sekolah dan praktik kerja industri di bengkel. Penilaian berbasis kerja dilakukan dengan mengembangkan; standar kompetensi, pembelajaran di sekolah dan di tempat kerja saat siswa belajar praktik kerja industri. Pengembangan standar kompetensi dilakukan dengan menggabungkan standar kompetensi lulusan di sekolah dengan kebutuhan kompetensi di industri.

Uji kompetensi berbasis kerja yang diusulkan memiliki tingkat penerapan yang baik terhadap praktik kerja industri bagi siswa, dan memberikan pendekatan untuk mendeskripsikan praktik yang tidak terbatas pada konteks pembelajaran.

*Kata kunci – uji kompetensi berbasis kerja, praktik kerja industri.*

## I. PENDAHULUAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan model uji kompetensi yang memadukan pengembangan standar kompetensi, kurikulum, pembelajaran berbasis kompetensi dan praktik kerja industri dalam suatu keterkaitan. Secara rinci tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan model uji kompetensi berbasis kerja bagi siswa Sekolah

Menengah Kejuruan/SMK bidang otomotif kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan ditinjau dari aspek pembelajaran di SMK dan praktik kerja industri di dunia usaha/industri. Uji kompetensi yang saat ini dilakukan oleh siswa SMK membutuhkan biaya dan waktu yang cukup mahal, karena dilakukan secara khusus setiap kompetensi secara terpisah.

SMK bertujuan untuk menyiapkan siswa memasuki lapangan kerja dan mengembangkan sikap profesional, mampu memilih karir, berkompeterisi, dan mengembangkan diri, menjadi tenaga kerja tingkat menengah untuk mengisi kebutuhan dunia usaha dan industri. Dewey (1916) berpendapat bahwa: a vocation means nothing but such a direction of life activities as renders them perceptibly significant to a person, because of the consequences they accomplish, and also usefull to his associate. Sementara itu Prosser (1925) menyatakan pendidikan kejuruan akan efektif apabila dilakukan melalui work environment, industry standard and work habit. Siswa bekerja seperti dilingkungan kerja dengan standar industry dan memiliki perilaku kerja yang baik.

DiRanna (2008) menyatakan bahwa pergeseran paradigma dalam proses belajar mengajar dimulai dengan penilaian. Gagasan ini mengisyaratkan bahwa keselarasan antara kurikulum, pembelajaran, dan penilaian mengarah ke pemahaman murid lebih baik. Ini berarti bahwa hubungan yang tidak terpisahkan antara kurikulum, pembelajaran, dan penilaian dapat meningkatkan pemahaman siswa dan guru untuk mengajar dengan baik. Competence-based assessment/CBA menurut Fletcher (2000) adalah mengacu pada aturan kerja dan untuk mendapatkan standar kompetensi kerja. CBA sebagai pendekatan untuk menetapkan standar

kompetensi yang relevan dengan sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan, penekanannya pada kompetensi yang didemonstrasikan dalam keterampilan penting dalam suatu pekerjaan (Hawke, 1998). Menurut kedua pendapat di atas, acuan dalam penilaian berbasis kompetensi menggunakan standar kompetensi kerja dan relevansi dengan dunia kerja.

Menurut Halliday (2012) uji kompetensi dalam pendidikan kejuruan mempunyai dua elemen dasar, yaitu pengumpulan bukti kemampuan setiap siswa dan menggunakan bukti itu untuk membuat keputusan tentang apakah siswa tersebut telah mencapai standar kompetensi seperti yang telah ditetapkan secara nasional atau seperti yang tertuang dalam kurikulum yang digunakan. Meanwhile SAQA (2005) menyatakan bahwa untuk melakukan uji kompetensi terpadu harus didukung oleh aktivitas pengajaran dan pembelajaran secara terpadu pula dan untuk memadukan antara pembelajaran dan uji kompetensi dilakukan dengan mengembangkan kurikulum. Jadi antara pengajaran, pembelajaran dan uji kompetensi merupakan kegiatan yang dapat dikembangkan sebagai suatu proses saling terkait. Ini mengandung makna bahwa kurikulum dan program pembelajaran perlu dikembangkan secara terpadu.

Uji kompetensi yang dilaksanakan di SMK di Indonesia saat ini menggunakan pola penilaian tidak melalui pekerjaan. Siswa yang telah menyelesaikan pembelajaran praktik di bengkel sekolah dan di industri, diuji oleh sekolah bekerjasama dengan industri atau oleh lembaga sertifikasi profesi. Model uji kompetensi ini kurang efisien, karena siswa mengikuti uji kompetensi berdasarkan cluster kompetensi secara terpisah. Uji kompetensi berbasis kerja merupakan uji kompetensi yang integratif, karena siswa sebagai peserta uji kompetensi melakukan suatu pekerjaan nyata di bengkel pada saat melaksanakan praktik kerja industri.

## II. METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model uji kompetensi di sekolah menengah kejuruan (SMK) dan

dimaksudkan untuk menghasilkan produk berupa model uji kompetensi berbasis kerja di SMK Teknologi dan Industri Bidang Otomotif Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan/TKR. Metode penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan (*research and development/R & D*), yang dikembangkan oleh Gall (Gall, 2007) dan telah dimodifikasi oleh Nana Syaodih Sukmadinata (2011). Penelitian R & D merupakan suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk-produk kependidikan. Responden terdiri dari guru, pembimbing praktik kerja industri, siswa dan asesor lembaga sertifikasi profesi dari empat sekolah dan empat bengkel mobil/industri.

Komponen model yang dikembangkan terdiri atas: (a) pengembangan standar kompetensi, (b) pengembangan kurikulum, (c) pengembangan pembelajaran, (d) pengembangan praktik kerja industri, dan (e) pengembangan uji kompetensi. Isi dari tiap-tiap komponen adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan standar kompetensi, standar kompetensi kerja nasional Indonesia/SKKNi dan kebutuhan industri menjadi acuan dalam merumuskan standar kompetensi.
- b. Pengembangan kurikulum, SMK dan institusi pasangan mengembangkan kurikulum melalui sinkronisasi kurikulum dengan memadukan kompetensi yang ada dalam SKKNi dan spektrum kurikulum dari Kemendikbud. Kurikulum tingkat satuan pendidikan/KTSP merupakan paduan antara standar kompetensi lulusan/ SKL & standar nasional pendidikan/SNP dari Kemendikbud dengan SKKNi.
- c. Pengembangan pembelajaran praktik di SMK, guru wajib memiliki sertifikat kompetensi keteknikan sesuai mata pelajaran yang diampu dan sekaligus guru sebagai asesor independen dalam bidang keteknikan, model pembelajaran berbasis kompetensi, siswa menggunakan modul, siswa dibekali *soft skill* berupa materi siswa SMK ber-Kaizen, siswa dibekali *skill passport*.
- d. Pengembangan praktik kerja industri, siswa memilih *cluster* kompetensi dengan seijin industri, siswa bekerja/belajar sesuai *cluster*

kompetensi pilihannya, penilaian dilakukan melalui uji kompetensi pada saat siswa bekerja dengan hasil kompeten atau belum kompeten sebagai mekanik junior dalam cluster kompetensi pilihannya.

- e. Pengembangan uji kompetensi, uji kompetensi dilakukan pada pekerjaan riil pada saat Prakerin, guru sebagai asesor, *skill passport* menjadi alat bukti kepemilikan kompetensi siswa, SMK memiliki tempat uji kompetensi/TUK, SMK memiliki lembaga sertifikasi profesi pihak pertama/LSPP-I, LSPP-I sebagai lembaga independen dibawah BNSP melaksanakan uji kompetensi melalui dua jalur, yaitu uji kompetensi dengan bekerja riil pada saat siswa prakerin di DU-DI, dan uji kompetensi secara simulasi, LSPP-I menerbitkan sertifikat kompetensi.

Prosedur penelitian dan pengembangan tersebut dilakukan dalam tiga tahapan yaitu: (1) studi pendahuluan, (2) pengembangan model, dan (3) uji model. Secara lebih ringkasnya model Borg dan Gall yang telah dimodifikasi oleh Nana Syaodih Sukmadinata. Langkah penelitian dan pengembangan ini dapat diuraikan sebagai berikut. *Langkah pertama* yaitu studi pendahuluan yang berisi: (1) studi pustaka tentang aspek-aspek yang diteliti, baik berasal dari kajian teori, hasil penelitian, maupun studi di lapangan yang berkaitan dengan uji kompetensi, dan (2) penyusunan draf produk uji kompetensi yang dilakukan berdasarkan studi pustaka dan *expert judgment* melalui *focus group discussion/FGD* dengan akademisi dan praktisi lembaga pendidikan dan industri/asosiasi. *Langkah kedua* yaitu pengembangan produk yang terdiri atas: (1) uji coba produk secara terbatas yang dilakukan pada dua (2) SMK, dan (2) uji coba produk secara diperluas yang dilakukan pada empat (4) SMK. *Langkah ketiga* adalah pengujian yang terdiri dari pengujian produk akhir dan sosialisasi hasil.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil wawancara mendalam dengan praktisi, akademisi, dan industry dianalisis dan dijadikan panduan dalam pembahasan.

Pembahasan meliputi aspek pengembangan standar kompetensi, pengembangan kurikulum, pengembangan pembelajaran di SMK dan industri, pengembangan uji kompetensi di SMK di Yogyakarta.

#### **Pengembangan Standar Kompetensi**

Standar kompetensi dalam pendidikan kejuruan dikembangkan berdasarkan perpaduan antara SKKNI bidang otomotif sub bidang teknik kendaraan ringan dengan standar kompetensi lulusan/SKL kurikulum dari kemendikbud yang meliputi aspek pengetahuan, sikap, dan ketrampilan. SKKNI dijadikan panduan dalam mengembangkan standar kompetensi di SMK karena tujuan pendidikan di SMK adalah mempersiapkan siswa untuk bekerja. Norton (2008) menyebutkan bahwa dalam analisis tugas standar diawali dari analisis kebutuhan pekerjaan dan diakhiri dengan pengembangan profil kompetensi. Pendapat Norton ini mengisyaratkan bahwa dalam pengembangan standar kompetensi perlu dilakukan analisis kebutuhan pekerjaan, yang tidak lain sudah tertuang dalam SKKNI, dan dikembangkan menjadi standar kompetensi. Pendapat lain diutarakan oleh Kelly (2000) yang menyatakan bahwa dalam merumuskan standar dasar dalam pendidikan kejuruan perlu dikembangkan konsep dan operasi dasar dan aspek-aspek kemanusiaan, etika dan sosial. Pernyataan Norton dan Kelly menguatkan bahwa perlu adanya paduan antara SKL dan SKKNI dalam mengembangkan standar kompetensi di SMK.

Standar kompetensi harus disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan didasarkan pada patokan acuan. Pendapat yang mendukung pernyataan di atas disampaikan oleh Lester (2017) dan Reeves (2004) yang menyatakan bahwa pendekatan pendidikan berdasarkan *standards* meliputi: (a) *standards are fixed*, maksudnya adalah bahwa dalam sistem yang didasarkan pada standar, siswa harus mampu melakukan kompetensi yang telah ditentukan, (b) *standards measure proficiency*, kecakapan melakukan suatu pekerjaan/tugas menjadi ukuran dalam sistem standar, (c) *standards are challenging*, sistem standar menantang seluruh

peserta didik untuk menguasai pengetahuan dan ketrampilan yang telah ditentukan/distandarisasi, dan (d) *standards are simple*, dalam sistem standar hasil pendidikan adalah “mampu atau tidak mampu (kompeten atau tidak kompeten)” yang mudah dipahami. SMK bertujuan menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja dan mengembangkan sikap profesional, mengembangkan diri, dan menjadi tenaga kerja tingkat menengah untuk mengisi kebutuhan dunia usaha dan industri. Berpedoman pada tujuan pendidikan di SMK tersebut, maka standar kompetensi yang dipelajari siswa SMK harus disesuaikan dengan kompetensi dan pekerjaan yang ada di industry.

## 2. Pengembangan Kurikulum

Hasil wawancara mendalam menyatakan bahwa pakar pendidikan/akademisi bidang pengembang kurikulum dan pengembang bidang studi teknik otomotif harus dilibatkan dalam pengembangan kurikulum, disamping unsur dunia usaha dan industri. Pendapat yang mendukung bahwa pakar pendidikan bidang pengembang kurikulum dan bidang teknik otomotif dilibatkan dalam pengembangan kurikulum adalah Norton (2008). Norton menyatakan bahwa personil yang terlibat dalam pengembangan kurikulum terdiri dari: (a) *administrators*, adalah akademisi dalam bidang pendidikan kejuruan, (b) *instructional staff*, adalah instruktur bidang keteknikan, (c) *support personel*, adalah pengembang kurikulum/program, dan (d) *advisory personel*, adalah komite ahli/asosiasi profesi. Pendapat Norton mengisyaratkan bahwa anggota yang harus terlibat agar kurikulum dapat dikembangkan secara efektif dan efisien adalah meliputi unsur ahli pendidikan keteknikan, pengembang kurikulum, dan praktisi.

Saran tim ahli yang menyatakan bahwa dalam mengembangkan kurikulum, kebutuhan siswa dan kondisi sosial perlu dipertimbangkan dalam memenuhi kebutuhan pekerjaan sejalan dengan pendapat Rauner (2009) yang menyatakan bahwa dalam pengembangan kurikulum pendidikan kejuruan; *the occupational form of work becomes the point of reference for the development of curricula*. Pendapat Rauner ini

mengisyaratkan bahwa dalam mengembangkan kurikulum pendidikan kejuruan, bentuk pekerjaan yang berhubungan dengan jabatan/tugas menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum tersebut. Pendapat lain yang mendukung kebutuhan siswa dan kondisi sosial perlu dipertimbangkan dinyatakan oleh Scott (2004) yang menyatakan bahwa pendidikan kejuruan sebagai lembaga pendidikan harus memperluas kesempatan bagi siswa untuk belajar atau bekerja sesuai kebutuhan.

## 3. Pengembangan Pembelajaran Berbasis Kompetensi

Hasil masukan dari tim ahli, yang menyatakan bahwa modul sebagai salah satu sumber belajar perlu diperkaya dengan sumber-sumber belajar lainnya untuk memberikan keleluasaan siswa dalam melakukan pengayaan sesuai dengan pendapat Norton (2008) yang menyatakan bahwa pembelajaran harus dapat menyediakan program untuk pengembangan individu dan proses pembelajaran dapat berlangsung di tempat kerja. Pendapat lain yang mendukung pernyataan diatas dikemukakan oleh Clark & Winch (2007) yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip pendidikan kejuruan menekankan manfaat teknologi informasi sebagai sumber belajar. Perubahan teknologi akan selalu dioptimalkan dalam proses pembelajaran kejuruan. Jadi sumber belajar selalu diperkaya dengan adanya perkembangan teknologi. Pembelajaran di SMK dikembangkan dengan menggunakan modul sebagai salah satu media pembelajaran dan diperkaya dengan menggunakan teknologi informasi sebagai sumber belajar lainnya.

Model pembelajaran perlu dikembangkan kearah pembelajaran kooperatif dan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang menjadi catatan *expert judgment* dan senada dengan pendapat Clark & Winch (2007) yang menyatakan bahwa pendidikan kejuruan memiliki karakteristik antara lain: *pertama*, kurikulum harus menunjukkan relevansi dengan kebutuhan kejuruan. Prinsip ini menunjukkan bahwa kurikulum pendidikan kejuruan harus relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Ketrampilan dasar dalam industri harus

dilatihkan kepada siswa. Kurikulum pendidikan kejuruan harus berisi kompetensi yang relevan dengan keahlian mereka dalam dunia kerja. Sebagai contoh, kurikulum sekolah kejuruan jurusan otomotif minimal harus berisi kompetensi *tune-up* mesin, sistem pemindah daya, casis, dan sistem kelistrikan otomotif. *Kedua*, pengetahuan harus dapat memberikan cara yang lebih baik untuk proses pembelajaran, untuk mengidentifikasi masalah dan pemecahan masalahnya. Prinsip ini menunjukkan bahwa dalam pembelajaran harus terjadi proses penambahan pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah kehidupan. Ini berarti bahwa proses pembelajaran harus mampu menjadi dasar pengembangan pengetahuan secara terus-menerus.

Thompson (1973) menyatakan bahwa pendidikan kejuruan dibangun berdasarkan prinsip-prinsip: *pertama*, harus sesuai dengan tujuan pembangunan. Pendapat ini menunjukkan bahwa pendidikan kejuruan harus selalu mengikuti perkembangan teknologi dalam merealisasikan tujuan pembangunan. Ini tidak dapat dihindari karena teknologi selalu berkembang seiring perubahan jaman. *Kedua*, pasar tenaga kerja menjaga keseimbangan antara kebutuhan pekerjaan dan jumlah pengangguran, dan antara kesempatan kerja dan tenaga kerja terlatih. Pendapat ini menunjukkan bahwa pendidikan kejuruan sebagai penyedia tenaga kerja terlatih dapat memberikan kontribusi untuk menyeimbangkan kebutuhan tenaga kerja terlatih dengan pekerjaan yang tersedia. Konsekuensi dari argumen ini adalah bahwa sekolah kejuruan harus mampu menyediakan tenaga terlatih sesuai dengan jenis pekerjaan yang dibutuhkan. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa pendidikan kejuruan perlu bekerjasama dengan dunia kerja sehingga dapat memetakan kebutuhan tenaga kerja dan melatih siswa sekolah kejuruan sebagai calon tenaga kerja agar menjadi tenaga kerja trampil. Pendapat Thomson tersebut mendukung catatan *expert judgment* bahwa model pembelajaran perlu dikembangkan ke arah pembelajaran kooperatif dan sesuai dengan tuntutan kurikulum.

Hasil catatan *expert judgment* yang menyatakan bahwa model penilaian perlu mempertimbangkan penilaian proses seiring dengan pendapat Clark & Winch (2007) bahwa prinsip kurikulum yang mendalam tercermin pada suatu sistem penilaian yang bertujuan merekam apa yang telah dicapai di seluruh sistem pembelajaran. Dalam perencanaan kurikulum, di samping mengandung apa dan bagaimana proses pembelajaran harus dilaksanakan, tetapi juga mengandung apa dan bagaimana sistem penilaian itu harus dilakukan. Pendapat lain yang menyatakan bahwa penilaian memerlukan proses dikemukakan oleh Miller (2008) dan Finch (1999). Penilaian adalah istilah yang lebih luas dibandingkan dengan pengujian dan proses umum yang meliputi pengumpulan, mensintesis, dan menafsirkan data informal dan data formal. Penilaian siswa SMK yang dilakukan selama siswa belajar di SMK adalah merupakan bentuk penilaian proses.

Karakteristik penting yang terdapat pada model pendidikan berbasis kompetensi menurut Gonczi (1998) diantaranya: (a) adanya daftar kompetensi yang terdokumentasikan disertai dengan standar dan kondisi khusus untuk masing-masing kompetensi, (b) setiap saat siswa dapat dinilai pencapaian kompetensinya manakala telah siap, (c) pembelajaran berlangsung dengan format modul yang berkaitan dengan masing-masing kompetensi, (d) penilaian didasarkan pada standar tertentu sesuai kompetensi yang dipersyaratkan, (e) uji kompetensi didasarkan pada keterampilan yang didemonstrasikan secara nyata, (f) siswa dapat melanjutkan ke unit kompetensi berikutnya jika kompetensi yang dipelajari telah tercapai, (g) hasil belajar siswa dicatat dan dilaporkan dalam buku kompetensi. Pendapat Gonczi semakin menguatkan bahwa penilaian berbasis kompetensi harus didukung dengan catatan kompetensi yang telah dicapai, dalam hal ini dicatat dalam *skill passport*.

#### **Pengembangan Praktik Kerja Industri**

Hasil wawancara dengan *expert judgment* tentang monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan praktik kerja industri harus selalu

dilaksanakan agar program dapat berjalan dengan efektif didukung oleh pendapat Streumer (2006) yang menyatakan bahwa praktik kerja industri (*on the job training/OJT*) membutuhkan pengaturan: (a) adanya tujuan pelatihan yang jelas, (b) perlu adanya evaluasi *OJT* untuk menentukan pencapaian tujuan pelatihan. Pendapat senada dikemukakan oleh Semb (2000) yang menyatakan bahwa penilaian dalam *OJT* melibatkan dua klasifikasi yang saling terkait yaitu: (1) isi program pembelajaran yang telah dianalisa untuk menentukan kebutuhan yang harus dipenuhi, (2) *trainer* mendiagnosa pengetahuan dan ketrampilan peserta pelatihan pada awal program yang berkaitan dengan isi pelatihan. Praktik kerja industri sebagai bagian dari proses belajar mengajar yang dilakukan di industri perlu dilengkapi dengan program evaluasi. Evaluasi praktik kerja industri dalam model uji kompetensi dilakukan melalui pekerjaan, artinya pada saat siswa praktik kerja industri, juga dilakukan penilaian. Siswa yang sudah mampu melaksanakan pekerjaan sesuai standar industri dapat dinyatakan kompeten pada bidang pekerjaan tersebut.

Hasil wawancara dengan *expert judgment* yang menyebutkan bahwa program praktik kerja industri perlu ada standarisasi kompetensi beserta kriteria unjuk kerjanya yang diberlakukan di bengkel tempat siswa melakukan praktik kerja industri didukung oleh pendapat Streumer (2006) yang menyatakan bahwa pembelajaran di tempat kerja yang didasarkan pada desain pelatihan yang rinci seperti yang tertuang dalam teori desain pembelajaran. Tujuan pelatihan ditetapkan berdasarkan analisis tugas di tempat kerja dan bahan pembelajaran dikembangkan sesuai dengan kondisi di lingkungan kerja. Standarisasi kompetensi beserta kriteria unjuk kerjanya program praktik kerja industri siswa SMK dituangkan dalam *skill passport*.

Halliday (2012) dalam penelitiannya<sup>5</sup> tentang uji kompetensi di tempat kerja menemukan bahwa *assessor* dan *trainer* yang terlibat dalam penelitiannya sepakat bahwa pendekatan uji kompetensi tersebut merupakan cara yang menyeluruh dan utuh melalui metode *clustering* dalam uji kompetensi. Pendekatan ini

juga membantu siswa untuk mempertimbangkan apa saja yang penting dalam pembelajaran sebagai prinsip-prinsip dan konsep kunci, hubungan antara ide-ide dan hubungan konsep baru dengan pengetahuan sebelumnya. Dalam penelitian ini, para *assessor* dan *trainer* juga meyakini bahwa metode itu adalah sangat penting bagi siswa untuk secara jelas memahami konteks bahwa pelatihan dan uji kompetensi adalah ada dalam satu tempat. Pendapat Halliday ini semakin menguatkan bahwa pada saat siswa melaksanakan prakerin dapat dilakukan uji kompetensi. Temuan adanya asesor yang kurang familier dengan system uji kompetensi ini sesuai dengan pendapat Haines (2013), sehingga syarat menjadi penilai adalah harus telah memiliki sertifikat sebagai asesor.

Tujuan Pendidikan Sistem Ganda/PSG menurut Depdikbud (1999) adalah: (1) meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan kejuruan melalui peranserta institusi pasangan/industri, (2) menghasilkan tamatan yang memiliki pengetahuan, ketrampilan dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja, (3) menghasilkan tamatan yang memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang menjadi bekal dasar pengembangan dirinya secara berkelanjutan, (4) memberi pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan, dan (5) meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan melalui pendayagunaan sumber daya pendidikan yang ada di dunia kerja. Dua pernyataan terakhir mengisyaratkan bahwa program PSG dalam bentuk prakerin dapat digunakan untuk memberi pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan dan untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan.

### **Pengembangan Uji Kompetensi Berbasis Kerja**

Menurut catatan *expert judgment*, keberadaan tempat uji kompetensi/TUK dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama/LSPP-I di SMK yang dikembangkan perlu didukung dengan kebijakan dan regulasi yang kuat.

Pendapat itu dikuatkan oleh Dedi Supriadi (2002) yang menyatakan bahwa salah satu prinsip pendidikan kejuruan dalam pengukuran hasil pembelajaran sebaiknya dilakukan oleh lembaga independen berdasarkan standar kompetensi yang berlaku di industri. Pendapat senada dikemukakan oleh Depdikbud (1997) yang menyatakan bahwa proses uji ketrampilan dilaksanakan oleh badan nasional. Uji kompetensi di SMK perlu dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang diakui oleh badan sertifikasi profesi agar mendapat pengakuan dari lembaga independen. Menurut pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi/BNSP, lembaga pendidikan dan latihan dapat mengupayakan keberadaan LSPP-I. Siswa SMK diuji oleh LSPP-I yang telah mendapat akreditasi dari BNSP.

Uji kompetensi adalah pengumpulan bukti kompetensi dilakukan oleh asesor yang memiliki kewenangan. Menurut Halliday (2012) uji kompetensi dalam pendidikan kejuruan mempunyai dua elemen dasar, yaitu pengumpulan bukti kemampuan setiap siswa dan menggunakan bukti itu untuk membuat keputusan tentang apakah siswa tersebut telah mencapai standar kompetensi seperti yang telah ditetapkan secara nasional atau seperti yang tertuang dalam kurikulum yang digunakan. Kompetensi yang telah dimiliki siswa SMK pada saat melaksanakan prakerin dan telah dicatat dalam *skill passport* dapat dijadikan bukti sebagai proses uji kompetensi. Uji kompetensi dalam bentuk pengumpulan bukti kompetensi dilakukan oleh LSPP-I. Siswa yang telah memenuhi syarat kompetensi dinyatakan telah kompeten dan mendapat sertifikat dari LSPP-I. Siswa yang belum dinyatakan kompeten karena bukti kompetensi belum memenuhi syarat dan siswa yang ingin menambah kompetensi dapat mengikuti uji kompetensi di TUK LSPP-I dengan menggunakan pola tidak melalui pekerjaan/simulasi. Siswa yang telah memenuhi seluruh paket kompetensi akan mendapat sertifikat sebagai teknisi junior kendaraan ringan dan bagi yang belum memenuhi akan mendapat sertifikat sesuai kompetensi yang telah dikuasai yang tertuang dalam *skill passport*.

#### IV. KESIMPULAN

Komponen pembelajaran yang dapat mendukung pelaksanaan model uji kompetensi berbasis kerja adalah: (a) guru wajib memiliki sertifikat kompetensi dan menjadi asesor independen, (b) model pembelajaran berbasis kompetensi, (c) siswa dibekali dengan *soft skill* melalui materi siswa ber-Kaizen, (d) *skill passport* yang tervalidasi menjadi panduan untuk mencapai kompetensi dan sekaligus menjadi alat bukti pencapaian kompetensi, (e) SMK memiliki TUK, (f) SMK menjadi lembaga sertifikasi profesi independen dalam bentuk LSPP-I.

Komponen praktik kerja industri yang dapat mendukung pelaksanaan model uji kompetensi berbasis kerja adalah: (a) siswa harus memiliki *basic skill* seperti yang tertuang dalam *skill passport*, (b) siswa memilih lokasi tempat praktik yang telah memiliki MoU dengan sekolah, (c) siswa melakukan observasi di tempat praktik, menentukan pilihan fokus pekerjaan/kluster kompetensi dan mendapat persetujuan pihak industri, (d) SMK menugaskan siswa untuk melaksanakan prakerin sesuai hasil persetujuannya dari industri, (e) uji kompetensi dilakukan melalui pekerjaan riil, (f) pembimbing industri sebagai *external assessor* menguji siswa, dan (g) kompetensi yang telah dikuasai siswa dicatat dalam *skill passport*.

Model uji kompetensi berbasis kerja di SMK yang dikembangkan meliputi: (a) standar kompetensi dikembangkan berdasarkan perpaduan antara SKKNI bidang otomotif sub sektor TKR dengan standar kompetensi lulusan/SKL, (b) silabus disinkronisasi dengan kebutuhan pekerjaan yang ada di industri dan dilakukan secara rutin setiap tahun, (c) komponen pembelajaran di SMK meliputi: guru menjadi asesor independen, siswa melaksanakan materi *soft skill* melalui penanaman budaya Kaizen dan laporan hasil belajar dalam bentuk *skill passport*, SMK memiliki TUK, dan menjadi lembaga sertifikasi profesi independen, dan (d) siswa melaksanakan prakerin dengan fokus pada kluster kompetensi, uji kompetensi dilakukan melalui pekerjaan riil di industri.

Model uji kompetensi berbasis kerja yang layak dilaksanakan di SMK adalah uji kompetensi yang memadukan antara proses pembelajaran dengan proses penilaian yang dilakukan pada saat siswa melaksanakan praktik kerja industri dengan menggunakan pola siswa bekerja pada pekerjaan riil.

## V. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dewey, J. *Democracy and education*. New York : Dover Publications, Inc. 1916.
- [2] DiRanna, K., Osmundson, E., Topps, J., et.al. *Assessment-centered teaching; a reflective practice*. Thousand Oaks : A Sage Company, 2008.
- [3] Clark, L., & Winch, C. *Vocational education, international approaches, developments and systems*. Oxon: Routledge, 2007.
- [4] Dedi Supriadi, Wiranto Arismunandar, Soenaryo, dkk. *Sejarah pendidikan teknik dan kejuruan di Indonesia, membangun manusia produktif*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, 2002.
- [5] Depdikbud. *Ketrampilan menjelang 2020 untuk era global*. Laporan satuan tugas pengembangan pendidikan dan pelatihan kejuruan di Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997.
- [6] Depdikbud. *Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 323/U/1997 tentang penyelenggaraan pendidikan sistem ganda pada sekolah menengah kejuruan*. Depdikbud, 1999.
- [7] Finch, C.R., & Crunkilton, J.R. *Curriculum development in vocational and technical education, planning, content, and implementation* (5<sup>th</sup> ed.). Needham Heights, Mass: Allyn & Bacon. 1999.
- [8] Fletcher, S. *Competence-based assessment techniques* (2nd Rev. ed.) London: Kogan Page Limited, 2000.
- [9] Gall, M. D., Gall, J. P., & Borg, W. R. *Educational research, an introduction* (8<sup>th</sup> ed.). Boston: Pearson Education, Inc, 2007.
- [10] Gonczy, A. (1998). *Developing a competent workforce: adult training strategies for vocational educators and trainers*. Leadbrook, SA: National centre for vocational education research Ltd, 1998.
- [11] Gulikers, J.T.M, Runhaar, P & Mulder. *An assessment innovation as flywheel for changing teaching and learning*, Journal of Vocational Education & Training, 2007. DOI: 10.1080/13636820.2017.1394353
- [12] Haines, C., Dennick, R., António, J. *Developing a professional approach to workbased assessments in rheumatology*. *Best Practice & Research Clinical Rheumatology* Volume 27, Issue 2, April 2013, Pages 123-136. <https://doi.org/10.1016/j.berh.2013.02.006>
- [13] Halliday-Wynes, S., & Misko, J. *Assessment issues in VET: minimizing the level of risk*. National Centre for Vocational Education Research Issues Paper (NCVER), 2012.
- [14] Hawke, G., & Oliver, L. *Assessment in modern vocational education. Developing a competent workforce, adult learning strategies for vocational educators and trainers*. Adelaide: NCVER, 1998.
- [15] Hayes, Kevin. *Work-place based assessments*. *Obstetrics, Gynecology & Reproductive Medicine*. Volume 22, Issue 7, July 2012, Pages 205-207 <https://doi.org/10.1016/j.ogrm.2012.03.002>
- [16] Kelly, M. G. (2000). *National educational technology standards for students, connecting curriculum and technology*. International society for technology in education. The U.S. Department of Education.
- [17] Lester, S. *Reconciling activity-based descriptions of competence with professional work*. *Higher Education, Skills and Work-Based Learning*, 00–00, 2017. <https://doi.org/10.1108/HESVBL-07-2017-0042>
- [18] Miller, P. W. *Measurement and teaching*. Munster, Indiana: Patrick W Miller and Associates, 2008.
- [19] Prosser, C. A., & Allen, C. R. *Vocational education in a democracy*. New York: Century, 1925.
- [20] Rauner, F. *TVET curriculum development and delivery*. in Maclean, R., Wilson, D (eds.). *International handbook of education for the changing world of work, bridging academic and vocational learning*. Springer Science+Business Media B.V, 2009.
- [21] Reeves, D. B. *Making standards work: how to implement standard-based assessments in the classroom, school, and district* (3<sup>th</sup> ed.) Englewood: Advanced Learning Press, 2004.
- [12] SAQA. *Guidelines for Integrated Assessment*. (Ebook). Pretoria: SAQA, 2005. <http://www.saqqa.org.za/>
- [22] Scott, L. J., Sarkees, M., & Wircenski. *Overview of career and technical education* (3<sup>th</sup> ed.) Homewood, Illinois: American Technical Publishers, Inc, 2004.
- [23] Streumer, J. N. *The effectiveness of OJT in the context of HRD*. Published by Springer, 2006.
- [24] Thompson, J. F. (1973). *Foundations of vocational education, social and philosophical concepts*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc, 1973.